

PERENCANAAN PARIWISATA YANG ADAPTIF TERHADAP POTENSI LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN EKOLOGI MENGACU PADA PERENCANAAN BERKELANJUTAN, STRATEGI PERENCANAAN REGIONAL DAN PERENCANAAN WISATA LOKAL DI KALIMANTAN TENGAH

Mandarin Guntur¹
Yunitha²

Abstraksi

Rencana pengembangan pariwisata di perdesaan yang adaptif terhadap potensi lingkungan dan perubahan ekologi di Kalimantan Tengah merupakan salah satu pilihan wisata yang menarik. Namun demikian, desa-desa yang diharapkan dapat menjadi pemicu pengembangan wisata tersebut sudah mengalami transformasi, menuju masyarakat perkotaan. Kebiasaan lama yang menjadi tradisi sudah pula ditinggalkan penduduk, layar kaca dan hiburan yang ditawarkan oleh media televisi telah banyak mempengaruhi dan mengubah pola hidup masyarakatnya. Selain itu pengrusakan hutan dan penambangan liar, merajalela di sepanjang sungai, sehingga menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Dilain pihak pemerintah daerah diharapkan dapat memacu pendapatan daerah, dari berbagai sektor, salah satunya adalah sektor wisata. Namun demikian peluang wisata yang ada belum bisa dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan, terutama yang adaptif terhadap potensi lingkungan dan perubahan ekologi.

Tulisan ini menjelaskan bagaimana mengembangkan wisata yang adaptif terhadap potensi lingkungan dan perubahan ekologi di Kalimantan Tengah. Mengacu pada perencanaan wisata yang berkelanjutan, strategi perencanaan regional, dan perencanaan wisata lokal. Interpretasi dilakukan secara langsung pada wilayah perdesaan di Kalimantan Tengah untuk menemu kenali potensi dasar wisata lokal yang dapat dikembangkan. Dalam tulisan ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan wisata perdesaan yang adaptif terhadap potensi lingkungan dan perubahan ekologi, merupakan kerjasama partisipatif masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan swasta secara berkelanjutan.

Kata Kunci : *Eco-development, Pariwisata, Perdesaan.*

PENDAHULUAN

Perencanaan pariwisata perdesaan yang adaptif terhadap potensi lingkungan dan perubahan ekologi di Kalimantan Tengah merupakan salah satu pilihan wisata yang menarik, karena sumber daya pariwisata yang besar di Kalimantan Tengah dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan wisata tersebut. Letak geografis yang unik, penuh warna, bervariasi dan garis

¹ Pengajar di Jurusan Arsitektur Universitas Palangka Raya, INDONESIA. Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman (Pengajar Mata Kuliah Perencanaan Pariwisata)

² Pengajar di Jurusan Arsitektur Universitas Palangka Raya, INDONESIA. Kelompok Keahlian Teori Arsitektur dan Tradisional Dayak (Pengajar Mata Kuliah Perencanaan Pariwisata)

pantai sebagai salah satu yang terpanjang di Indonesia memberikan kesempatan yang banyak untuk dikembangkan. Terdapat banyak kekayaan ekosistem yang dimiliki meliputi kekayaan biosfir, hutan mangrove, terumbu karang, hutan, pegunungan, sungai, danau dan juga keseimbangan yang luas antara flora dan fauna. Dengan munculnya pariwisata sebagai suatu instrument penting dalam pembangunan di Kalimantan Tengah, akan membantu pemberantasan kemiskinan, pemberian peluang kerja, perbaikan lingkungan, pengutamaan perempuan dan pemberian peluang yang luas kepada kelompok-kelompok yang tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik dan yang lebih penting lagi dengan adanya pariwisata, dapat menjadi alasan yang baik untuk preservasi dan proteksi terhadap sumber daya alam, lingkungan dan ekologi.

Satu sisi, masyarakat desa di Kalimantan Tengah, sekarang ini tidak saja memiliki kepekaan terhadap pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan tetapi juga mampu menyerap hal-hal baru yang menguntungkan bagi mereka. Mulai dari penerimaan teknologi televisi sampai media telekomunikasi canggih yang menghubungkan mereka dari satu desa ke desa lain menjadi lebih mudah. Selain itu pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan yang menghubungkan tiap-tiap desa memudahkan mereka saling berkoorporasi satu dengan yang lainnya. Dengan lancarnya komunikasi dan pertambahan pengetahuan baru, lambat laun kebiasaan alamiah yang mereka miliki mulai bergeser berganti dengan budaya masyarakat kota yang tinggal di desa. Untuk memenuhi kondisi tersebut kebutuhan ekonomi dalam hal ini adalah capital menjadi suatu kebutuhan yang mendesak diperoleh. Dampaknya nilai-nilai praktis dalam memperoleh capital tersebut menjadi sasaran yang hendak dicapai dalam waktu yang pendek, oleh karena itu pergeseran di masyarakat desa di Kalimantan Tengah dari masyarakat desa menuju masyarakat perkotaan menjadi tidak terhindarkan lagi.

Sementara itu pada kenyataannya di lapangan degradasi lingkungan yang terjadi akibat pembangunan di Kalimantan Tengah sudah mencapai titik nadir yang membahayakan. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh pembangunan tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah secara signifikan. Artinya kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kelompok masyarakat maupun individu, menjadi pemicu degradasi tersebut selain kerusakan yang ditimbulkan oleh alam sendiri akibat pemanasan global dan meluasnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (GTZ,1995). Hal lainnya adalah penambangan liar disungai-sungai yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan himbauan pemerintah, sehingga degradasi lingkungan terutama di sungai juga menjadi semakin parah akibat bercampurnya kandungan mineral air dengan zat kimia dari tambang rakyat yang larut kedalam air. Pola-pola ini bila berlangsung secara terus-menerus akan berdampak berubahnya lingkungan alamiah, kepada pola lain yang akan mengasingkan masyarakat itu sendiri (GTZ,2016). Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan tersebut secara berkelanjutan maka perlu dicari penyelesaian yang tepat agar lingkungan tidak menjadi rusak dan masyarakat tetap dapat berkembang dari generasi ke generasi tanpa merusak lingkungan alamiah yang dimilikinya.

Pilihan mengembangkan pariwisata perdesaan yang menerapkan konsep adaptif terhadap potensi lingkungan dan perubahan ekologi merupakan salah satu alternatif, agar kedua objek (masyarakat desa dan lingkungan) dapat saling bersinggungan, tanpa harus menghilangkan salah satunya. Artinya dengan mengembangkan konsep ekologi, lingkungan yang dikelola dapat dipertahankan, hal kedua yang dapat dipetik dari konsep pengembangan ini adalah usaha mata pecaharian masyarakat desa yang selama ini bergantung pada penambangan liar dan mengeksploitasi hasil hutan secara berlebihan lambat laun akan semakin berkurang dan beralih

kepada pelestarian lingkungan. Selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah apa menariknya ekowisata di perdesaan bagi masyarakat, jika keuntungan dari usaha wisata tersebut lari ke tempat lain? Tentu saja masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi mungkin mempunyai lebih banyak alasan yang meyakinkan untuk lebih mengeksploitasi sumber daya dari pada melestarikannya. Oleh karena itu pariwisata yang dilakukan dengan konsep ekologi akan lebih mengutamakan keuntungan bagi masyarakat desa setempat tanpa mengabaikan keuntungan bagi semuanya. Dengan demikian diperlukan strategi yang tepat untuk menghasilkan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat desa tersebut.

Strategi pengembangan tersebut hendaknya juga termasuk mempertimbangkan peningkatan kapasitas, aspirasi lokal, dan keuntungan masyarakat sekitarnya. Secara spesifik kebijakan dan arahan untuk pengembangan eco-tourism dan wisata petualangan, diformulasikan, terutama melalui suatu kerangka kerja secara teratur (*regular*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Oleh karena itu, kebijakan pariwisata di Kalimantan Tengah sebaiknya lebih banyak mengikuti pemikiran arus utama masyarakat yang mengadopsi berbagai tujuan-tujuan kritis seperti: perbaikan keperluan dasar untuk memperoleh pekerjaan, makanan, energi, air dan sanitasi. Selain itu juga harus meyakinkan bahwa pertambahan jumlah penduduk yang berkelanjutan akan melindungi dan mengembangkan sumberdaya berdasarkan orientasi teknologi, manajemen resiko yang dikawinkan dengan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Serta mengarahkan hubungan ekonomi secara internasional sehingga dapat menjamin pembangunan yang lebih partisipatif.

Tujuan-tujuan tersebut merupakan tanggungjawab bersama untuk membangun kesepakatan yang lebih besar terkait isu pembangunan berkelanjutan. Terminologi sustainability mulai digunakan sekitar tahun 1980-an yang dipresentasikan pada sidang *The World Conservation Union* (IUCN) tentang the World Conservation Strategy dimana pembangunan berkelanjutan dihubungkan dengan konservasi sumberdaya alam di sekitar tempat tinggal. Artinya pengembangan dimulai dari wilayah dimana masyarakat tinggal atau pada masyarakat perdesaan, dimana pengembangan tersebut akan berada di sekitar desa tersebut. Dengan demikian perencanaan wisata perdesaan yang adaptif terhadap potensi lingkungan dan perubahan ekologi bersesuaian dengan apa yang dicanangkan dalam IUCN.

TUJUAN

Menjelaskan bagaimana mengembangkan wisata yang adaptif terhadap potensi lingkungan dan perubahan ekologi di Kalimantan Tengah, mengacu pada perencanaan wisata yang berkelanjutan, strategi perencanaan regional, dan perencanaan wisata lokal.

WISATA PERDESAAN TERKAIT PENGEMBANGAN EKOLOGI

Perencanaan wisata perdesaan di Kalimantan Tengah dapat dimulai dengan memperhatikan dampak tekanan yang akan ditimbulkan oleh pertumbuhan pariwisata tersebut. Oleh karena itu penilaian terhadap perencanaan wisata perdesaan yang adaptif terhadap potensi lingkungan dan perubahan ekologi di Kalimantan Tengah, akan meminta masukan dari berbagai ahli dibidang sumberdaya alam, dibidang kepariwisataan dan pembangunan yang ada di Kalimantan Tengah. Kerangka tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan **tabel 17**. Kemudian untuk merespon tabel tekanan terhadap lingkungan tersebut maka perencanaan yang dilakukan, dapat diarahkan

ke dalam beberapa strategi perencanaan mulai dari strategi perencanaan regional, lokal hingga perencanaan wisata perdesaan yang berkelanjutan.

1) Strategi Perencanaan Regional Wisata Perdesaan (SPRP)

Tujuan dari strategi perencanaan regional perdesaan (SPRP) adalah **kenyamanan bagi pengunjung perdesaan, penghargaan kepada penduduk lokal, perlindungan terhadap kerusakan ekologi dan mengintegrasikan kehidupan masyarakat setempat dengan wisata**. Pertimbangan secara regional yang dilakukan oleh pemerintah propinsi adalah menyediakan secara umum informasi regional dan pedoman (*guidelines*) yang dapat menunjang wisatawan bertumbuh sesuai dengan tujuan dalam strategi diatas. Dalam kaitan ini satu lokasi tentunya tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan baik bila tidak berkaitan dengan lokasi lainnya. Misalnya, penambangan emas liar di hulu sungai Kahayan dan Barito akan merusak komunitas sungai di bagian hilirnya, yang kemudian berimbas rusaknya ekosistem sungai tersebut. Dengan demikian keaslian lingkungan dan ekologi yang dipertahankan dan dilindungi menjadi terganggu artinya salah satu tujuan proteksi terhadap ekologi menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu dalam strategi ini perlu dirancang suatu rekomendasi baik dari segi fisik dan program pertumbuhan wisatawan dan pengembangannya, khususnya identifikasi terhadap potensi zona-zona destinasi.

Tabel 17.
Tekanan Lingkungan Akibat Pariwisata

No	Aktivitas Tekanan Terhadap Lingkungan	Tekanan	Respon Primer lingkungan	Respon sekunder (reaksi) manusia
1	Terjadi perubahan secara permanen pada Lingkungan (a) Konstruksi utama aktivitas <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan wilayah kota • Jaringan transportasi • Fasilitas-fasilitas pariwisata • Aktivitas Pantai • Pembentukan dinding laut • Mesin bermain ski (b) Perubahan dalam Penggunaan Lahan Ekspansi lahan untuk rekreasi.	Restrukturisasi terhadap lingkungan lokal <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan terhadap lingkungan binaan • Produksi utama lahan di kurus habis 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan habitat • Perubahan terhadap populasi spesies secara biologi • Perubahan terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia • Perubahan terhadap kualitas visual 	Secara Individu yang muncul adalah dampak dari nilai-nilai estetika yang dikejar. Secara berkelompok: <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan untuk peningkatan kualitas lingkungan. • Pembiayaan untuk manajemen konservasi • Untuk perancangan konservasi satwa dan taman nasional • Pengontrolan akses untuk lahan rekreasi.
2	Pelapukan Sampah yang diakibatkan aktivitas Wisata akibat: <ul style="list-style-type: none"> • Urbanisasi • Transportasi 	Membawa Polusi <ul style="list-style-type: none"> • Emisi gas buang • Sampah cair yang dihasilkan oleh industri • Sampah padat • Kebisingan (lalu lintas, dan penerbangan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kualitas media lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Udara - Air - Tanah • Kesehatan organisme secara biologis • Kesehatan Manusia 	Pertahanan secara individu Lokal <ul style="list-style-type: none"> • Air Conditioning (AC) • Daur ulang sampah • Proses dan perubahan sikap. Wisatawan <ul style="list-style-type: none"> • Mengubah sikap agar peduli lingkungan • Menghapus pungutan terhadap wisatawan Pertahanan secara berkelompok

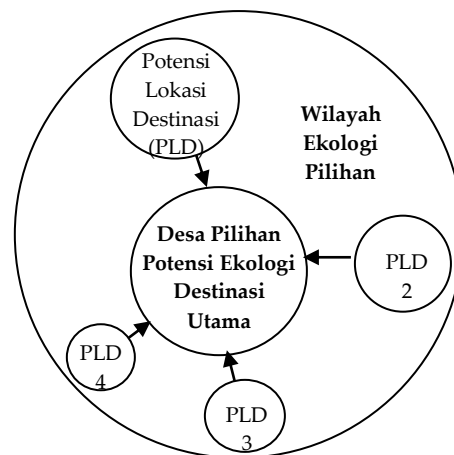
				<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan untuk polusi yang di timbulkan oleh turis yang berhubungan dengan industri • Pembersihan sungai dan pantai.
3	Aktivitas Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> • Berjalan Kaki • Berburu • Bersepeda • Pengkoleksian (souvenir) 	Pengrusakan terhadap vegetasi dan tanah <ul style="list-style-type: none"> • Terjadi Pengurangan terhadap spesies yang ada 	Perubahan pada Habitat <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan populasi spesies secara biologi 	Pertahanan secara berkelompok <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan untuk manajemen konservasi • Untuk perancangan konservasi satwa dan taman nasional • Pengontrolan akses untuk lahan rekreasi.
4	Efek dinamika penduduk <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penduduk 	Kepadatan Penduduk (temporer)	<ul style="list-style-type: none"> • Kesibukan • Permintaan terhadap Sumber Daya alam: lahan, air dan energi 	Secara Individu <ul style="list-style-type: none"> • Akan memunculkan kerumitan dan lingkungan Secara berkelompok <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan dalam dukungan pelayanan contoh: kebutuhan air dan listrik.

(Sumber: Pearce, 1981:47)

A. Strategi Wilayah Pilihan

Dalam SPRP lebih difokuskan pada satu wilayah atau region yang sudah direkomendasikan atau satu desa pilihan (Gambar 1). Oleh karena itu SPRP ini meminta suatu penanganan perencanaan teknis secara khusus oleh ahli perencanaan pariwisata atau oleh seorang ahli dibidang yang berkaitan dengan pariwisata. Friedmann (1973:347) menjelaskan bahwa tipe perencanaan jenis ini dinamakan intervensi untuk perubahan. Meskipun SPRP lebih menekankan pada teknik informasi dan proses-proses secara tersendiri namun hal tersebut tidak mendatangkan suatu penyelesaian terhadap persoalan pariwisata di lokasi tersebut. Oleh karena itu untuk memperoleh ke-efektif-an dalam pedoman teknik perencanaan terhadap fungsi sosial, ekonomi dan perubahan lingkungan di wilayah desa tersebut maka akan tergantung pada:

- (1) Kejelasan dari tujuan yang akan dicapai.
- (2) Pengembangan dari kesepakatan yang telah dibuat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai.
- (3) Melibatkan kepentingan politik dalam pengembangan tersebut.
- (4) Tingkat variasi pengembangan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan terkait dengan sistem secara keseluruhan.
- (5) Pengembangan yang dilakukan dengan pendekatan secara teknis dapat dipercaya membuat program dan strategi fisik dari SPRP sesuai dengan tujuan yang diharapkan.



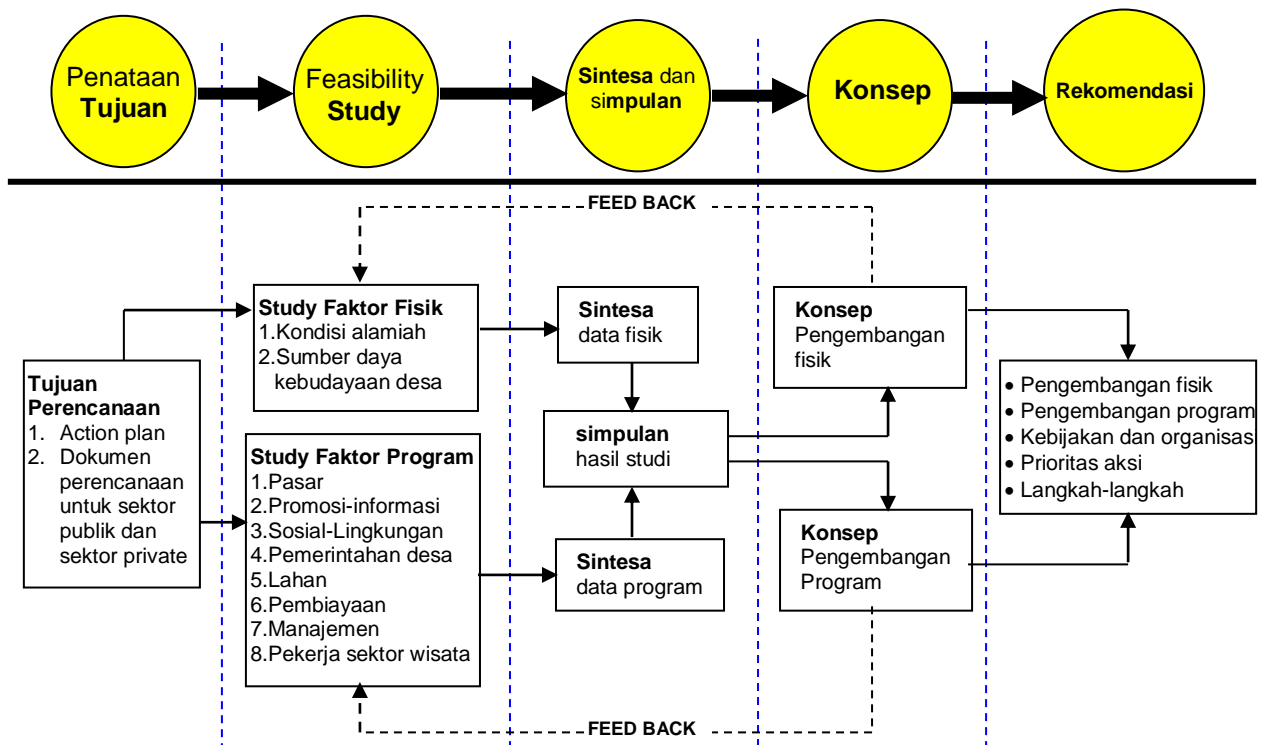
Gambar 35.
Strategi Wilayah Pilihan Destinasi
 Sumber : Mandarin, 2008

B. Proses Strategi Perencanaan Regional Perdesaan (PSPRP).

Berdasarkan identifikasi dari berbagai faktor permasalahan ekologi untuk pengembangan pariwisata di suatu wilayah atau desa tertentu di atas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor permasalahan tersebut ternyata memiliki kemungkinan bukan sebagai faktor penentu dalam perencanaan regional. Hal tersebut terjadi karena *stakeholder* yang terlibat memiliki tingkat kepentingan berbeda dengan strategi pengembangan ekonomi atau pengembangan ekologi wilayah perdesaan tersebut secara nasional maupun propinsi. Bila hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan kesulitan dalam mengubah *image* wisata secara cepat dan menarik wisatawan untuk datang ke wilayah desa tersebut. Hal tersebut tentunya akan berkaitan dengan penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan dan keterkaitannya secara keseluruhan terhadap wilayah desa pilihan sebagai destinasi utama. Untuk itu perlu suatu proses agar berbagai *stakeholder* yang terlibat dapat bersesuaian dengan strategi pengembangan yang sudah ada di wilayah desa tersebut baik pada tingkat propinsi maupun nasional. Dalam proses SPRP ini dapat dijadikan sebagai orientasi rekomendasi dan pedoman dasar untuk kebijakan secara regional maupun kebijakan secara lokal (Gambar 2). Sangat penting bagi suatu wilayah untuk terlibat dalam PSPRP secara spesifik dimana proses ini akan mempertemukan rencana pengembangan terhadap pemasaran wilayah desa tersebut. Oleh karena itu PSPRP ini harus terintegrasi dengan strategi pengembangan lainnya yaitu strategi pengembangan berkelanjutan dan strategi pengembangan lokal.

Secara detail penjelasan kelima langkah di atas meliputi, langkah pertama yaitu **Penataan Tujuan**, secara umum strategi perencanaan regional bagi pengembangan pariwisata relatif sama yaitu empat tujuan di atas, yang merupakan tujuan utama dari langkah pertama ini. Meskipun demikian tujuan tersebut harus dilakukan pembaharuan dari waktu-kewaktu. Bentuk perencanaan ini merupakan rekomendasi tentang isu pengembangan pariwisata dan kegiatan yang penting untuk semua tujuan ideal dari pariwisata agar fungsi sistem pariwisata yang dijalankan dapat bekerja dengan baik. Tujuan tersebut harus merupakan suatu yang luas dan komprehensif serta dapat dipenuhi, sehingga dapat dicapai dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Tentunya, hal ini juga harus bersesuaian dengan kesiapan organisasi regionalnya

dan kepentingan lokal dengan petunjuk pelaksanaannya sehingga memudahkan dalam pengembangan pariwisatanya. Langkah kedua adalah studi kelayakan (feasibility study)



Gambar 36.
Proses Strategi Perencanaan Regional Perdesaan
 Sumber : Modifikasi dari Gunn, 1988:226

Dalam **studi kelayakan** (feasibility study) akan menyangkut dua tujuan penting yaitu penyediaan data dasar untuk perencanaan hal itu juga berkaitan dengan kedekatan perencanaan dengan tokoh penting penentu proses perencanaan mulai dari, sponsor, pengrajin ahli, dan sektor publik di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan mulai dengan penilaian terhadap potensi pengembangan pariwisata. Penekanannya adalah dengan menemukan fakta utama, namun demikian studi ini harus merupakan ide baru yang cemerlang untuk pengembangan. Implementasi dan sektor publik haruslah dilibatkan sejak awal proses ini dilakukan. Dalam hal ini, studi yang dilakukan haruslah meliputi kepentingan pada sumber daya fisik wilayah desa tersebut dan pada sumber daya program terutama dalam pemasaran yang berkaitan dengan sosial-lingkungannya, dan iklim pada wilayah yang ditentukan. Kemudian study tentang sikap-sikap penduduk lokal terhadap wisatawan dapat memberikan informasi yang menarik untuk wisatawan. Beberapa hal lainnya selain yang berkaitan dengan sektor usaha wisata di wilayah desa tersebut harus juga dilakukan studi. Dampak lingkungan yang terjadi harus dilakukan studi yang lengkap, terutama di wilayah desa yang dipilih termasuk perbaharuan terhadap beberapa sumber daya yang sudah mulai menghilang. Langkah ketiga adalah Sintesa dan simpulan.

Dalam **sintesa** dan **simpulan** merupakan satu langkah untuk meringkas studi-studi yang dilakukan dalam perencanaan. Untuk membiasakan perencana memulai langkah rencananya dari hasil studi yang mendasari rekomendasi yang mereka berikan. Lebih-lebih dalam proses

sintesa harus dilakukan dengan kehati-hatian karena didalamnya terdapat data-data dan informasi yang diperoleh pada saat studi kelayakan. Dalam langkah ini diperlukan pemikiran yang logis dan masuk akal untuk menghasilkan pengertian dari berbagai fakta yang diperoleh, yang kemudian diakhiri dengan deskripsi penyimpulan secara umum, mewakili seluruh pemahaman secara komprehensif tetapi juga harus cukup spesifik untuk dijadikan dasar pengkonsepan agar ditemukan solusi dari permasalahan yang ada sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai rekomendasi perencanaan yang lebih baik. Langkah keempat yaitu konsepsualisasi.

Dalam **konsepsualisasi** yang dilakukan adalah menghimpun input yang sangat luas untuk menggantikan suatu perencanaan wisata yang tidak dapat diprediksi dan dihitung secara matematis. Dalam langkah ini kedua aktor baik masyarakat lokal maupun perencana akan melakukan studi data yang diperlukan dan menarik suatu kesimpulan secara bersama-sama. Kemudian melihat kedepan bagaimana solusi terbaik untuk meningkatkan pariwisata. Hasil akhir yang diharapkan adalah seberapa lama dapat bertahan ide baru dan logis hasil dari studi tersebut. Namun demikian sebelum ide-ide tersebut diformulasikan sebaiknya diuji terlebih dahulu ke belakang terhadap geografis lokasinya, kondisi eksisting sosial-lingkungannya dan masukan dari kebijakan lokalnya.

Langkah terakhir dari serangkaian proses ini adalah **rekomendasi** yang menyangkut dua tindakan pada pengembangan secara fisik dan pengembangan secara program. Rekomendasi ini disarankan hanya untuk jangka waktu yang singkat saja misalnya untuk keperluan satu sampai lima tahun, hal ini dilakukan karena perencanaan tersebut secara reguler memerlukan input baru. Rekomendasi tersebut harus merupakan representasi dari permasalahan dan isu yang terdapat dalam frame proses ini (gambar 2) yaitu isu sosial, ekonomi dan dampak lingkungan menjadi perhatian yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pertumbuhan maupun tidak pada suatu bidang juga merupakan hal yang perlu dijelaskan. Penempatan skala prioritas dan sekuensial dari berbagai kegiatan hendaknya juga bisa menjadi bagian dari rekomendasi. Pada dasarnya rekomendasi pada tingkat regional merupakan dasar bagi perencanaan di tingkat lokal yang memberikan berbagai kesempatan dan tanggungjawab bagi pengembangan pariwisata. Mungkin suatu rekomendasi bisa dimulai dengan memastikan suatu produk wisata yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pasar, mungkin saja dimulai dengan mempromosikan keunggulan secara geografisnya kemudian diikuti dengan potensi wisata dan rencana yang akan di kembangkan, dan seterusnya.

2) Strategi Perencanaan Lokal Wisata Perdesaan

Tujuan dari Strategi Perencanaan Lokal Wisata Perdesaan (**SPLP**) adalah memenuhi keempat strategi perencanaan regional yang sudah dicanangkan. Namun dalam SPLP lebih menekankan kepada keterkaitan antar lokal wilayah yang sudah ditentukan. Gunn (1988: 2) mengkategorikan lokal sebagai radius pelayanan wisata sekitar 35 km sampai 65 km, artinya wilayah lokal tersebut memiliki potensi untuk pariwisata. Beberapa kegiatan lokal wisata yang dapat dikembangkan dan disarankan meliputi: Piknik, Camping, Hiking, Bersepeda, Berburu, Memancing, Berperahu (menyusuri sungai Kahayan contoh: *Kalimantan Tourism Destination* (KTD), Cross country, Berenang, Tempat peristirahatan, Perjalanan Kawasan bersejarah, Festival (Isen Mulang festival, *Tiwah Festival* di Kalimantan Tengah), Perjalanan menikmati pemandangan, dan yang lainnya. Keterkaitan antar lokal tersebut berkaitan dengan keperluan wisatawan dalam memenuhi keperluannya yang tidak dapat diperoleh di perdesaan, seperti pusat informasi yang memudahkan mereka dalam hal berkomunikasi, akomodasi yang nyaman, perbelanjaan yang lengkap dan fasilitas kesehatan yang memadai. Namun demikian tidak semua wisatawan

berperilaku demikian ada juga yang masih bertahan di perdesaan karena keperluan yang mereka inginkan sudah dapat terpenuhi dengan baik di perdesaan tersebut.

A. Proses Perencanaan Lokal Wisata Perdesaan

Dalam Proses Perencanaan Lokal Wisata Perdesaan (PPLP) akan mencakup lima (5) kunci pengembangan yaitu: (1) **Pengelompokan** (*clustering*) yaitu keperluan suatu lokal wisata (LW) untuk saling berkoorporasi satu dengan yang lain. (2) **Tidak dibentuknya penduplikasian** LW yang sama, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kompetisi diantara LW tersebut. (3) **Pemain-pemain kunci**, merupakan hal pertama yang diharapkan keterlibatannya berkoorporasi didalam masing-masing LW. (4) **Sikap dan kewaspadaan**, hal ini dimaksudkan supaya bisa mempertahankan program yang sudah dicanangkan untuk memperoleh kebersamaan dari semua LW yang telah ditentukan. (5) **Keuangan**, merupakan dasar untuk memperoleh dukungan dalam kegiatan awal sebelum menarik sejumlah wisatawan lainnya. Dari kelima proses tersebut dapat digambarkan bahwa proses perencanaan LW akan berkaitan dengan kegiatan wisata yang dicanangkan dan dengan strategi perencanaan regional yang telah ditetapkan.

3) Perencanaan Wisata Perdesaan yang Berkelanjutan

Perencanaan wisata perdesaan yang berkelanjutan, dapat dijadikan sebagai suatu sistem model yang interaktif berdasarkan pengembangan perencanaan regionalnya. Dalam hal ini tiap sektor dari perencanaan tersebut tidak diarahkan sebagai subjek utama perencanaan. Sekalipun tiap sektornya memiliki inisiatif, dan interaksi terhadap semua sektor lainnya dalam pengambilan keputusan. Artinya perencanaan wisata perdesaan yang berkelanjutan merupakan aplikasi dari sistem perencanaan yang melibatkan banyak agensi, organisasi dan sektor swasta. Sementara itu di Kalimantan Tengah (Central Borneo) pengembangan perencanaan pariwisata yang ada merupakan suatu perencanaan yang dilegislati berdasarkan sistem birokrasi atau hirarkinya. Dimana setiap keputusan perencanaan merupakan keputusan DPR, akibatnya perencanaan yang ada kurang memiliki inisiatif dalam pengembangannya sehingga berdampak pada keuntungan dan kapital yang diperoleh menjadi kurang maksimal.

Dari sisi lain suatu perencanaan pariwisata yang lebih dipentingkan adalah bagaimana perencanaan tersebut bisa memperoleh kapital dan keuntungan yang besar dari komunikasi dan keterkaitannya terhadap sektor-sektor lain. Misal tersedianya akomodasi yang dikelola dengan baik dan berkaitan dengan sejarah dari desa tersebut, festival yang sering dilakukan (tiwah), dan tempat-tempat rekreasi lainnya. Semua hal tersebut sebaiknya berguna untuk menstimulasi pengunjung dan memberikan kontribusi agar tercipta suatu perencanaan yang terintegrasi bagi wisatawan. Contoh lainnya dinas pekerjaan umum dalam menyediakan sarana jalan juga harus menyediakan petunjuk wisata yang melintasi jalan tersebut. Dalam hal ini dinas PU harus bekerjasama dengan dinas pariwisata. Oleh karena itu, perencanaan yang berkelanjutan sebaiknya juga terintegrasi dengan perencanaan di dinas pariwisata dan dinas lainnya. Hal ini dimaksudkan agar di level tersebut dinas pariwisata dapat mempromosikan obyek wisata dan bertanggungjawab terhadap keaktifan dari perencanaan yang dilaksanakan. Sehingga keputusan perencanaan berkelanjutan ini merupakan keputusan menyeluruh yang melibatkan sektor publik dan swasta secara bersama-sama, dan terus menerus.

KESIMPULAN

Perencanaan wisata perdesaan yang mengembangkan konsep adaptasi terhadap potensi lingkungan dan perubahan ekologi, sebaiknya merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk membantu membatasi meluasnya degradasi lingkungan dan sumberdaya wilayah perdesaan akibat, aktivitas masyarakat yang tidak melihat pelestarian terhadap lingkungan dan sumber daya sebagai bagian yang sangat mendasar. Namun demikian, tindakan yang tepat tersebut merupakan bagian inisiatif pemerintah yang melihat kebijakan tersebut sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Sisi lainnya sektor swasta menanggapi hal tersebut sebagai suatu peluang untuk dapat memperoleh keuntungan, pengurangan pajak, kemudahan administrasi dan keamanan dalam mengembangkan investasi. Beberapa hal yang perlu untuk menjadi perhatian adalah:

1. Mengurangi tekanan terhadap ekosistem dan lahan yang belum tersentuh oleh manusia dengan cara memanfaatkan lahan yang sudah dibuka secara efisien dan seimbang, baik untuk masa kini dan masa yang akan datang.
2. Meningkatkan insentif bagi pengelolaan lahan, hutan dan perairan lokal yang dimiliki.
3. Mengakui hak atas lahan yang dimiliki secara turun-temurun suatu masyarakat tertentu, kemudian mendukung mereka dengan mengarahkan masyarakat tersebut dapat mengelola pengembangan wisata yang berdasarkan ekologi sesuai dengan kearifan lokal yang mereka miliki.
4. Pemerintah dapat memberikan ganti rugi kepada masyarakat perdesaan yang dikembangkan wilayahnya sebagai lokasi pengembangan pariwisata perdesaan berdasarkan ekologi tersebut bila terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh banyaknya pengunjung dan meluasnya pariwisata.
5. Mengembangkan pengelolaan keanekaragaman hayati secara bersama-sama antar penduduk wilayah desa yang mengembangkan konsep ekologi dengan pemerintah.
6. Mendorong masyarakat lokal yang berada di wilayah desa untuk melihat peluang dalam mengembangkan pemasaran atas produk alamiah yang dikembangkan secara berkelanjutan ke pasar lokal, nasional dan Internasional.
7. Meningkatkan keuntungan lokal dari pariwisata yang mengembangkan konsep ekologi, serta memastikan bahwa pengembangan tersebut tidak menimbulkan kerugian pada lingkungan, budaya, sumber daya dan selain itu juga pengembangan tersebut tidak menimbulkan konflik sosial-politik baik secara horisontal maupun vertikal.
8. Memperkuat kemampuan masyarakat lokal dimana pengembangan pariwisata yang adaptif terhadap potensi lingkungan dan perubahan ekologi dilaksanakan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Agar mereka dapat memelihara keuntungan dari kekayaan alam dan sumber daya yang dimilikinya tanpa merusak dan menghilangkan sumberdaya tersebut.
9. Mengembangkan metode dan mekanisme baru dalam dialog, perencanaan dan pemecahan masalah yang dihadapi wilayah desa yang mengembangkan konsep adaptasi lingkungan dan perubahan ekologi.
10. Membentuk dan mengembangkan organisasi di tingkat wilayah desa yang menerapkan ekologi, sebagai pusat informasi, pemberdayaan, pengelolaan, dan distribusi berbagai produk wisata yang dikembangkan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunn Clare (1988) *Tourism Planning*, Taylor & Francis, New York, USA.
- GTZ (1995) *Strategi Keaneka Ragaman Hayati*, Gramedia, Jakarta, Indonesia.
- GTZ (2016) *Strategi Keaneka Ragaman Hayati*, Gramedia, Jakarta, Indonesia.
- Mill dan Alastair (1985) *The Tourism System, an introductory Text*, Prentice-Hall, New Jersey, USA
- Mandarin (2008) *Perencanaan Wisata Perdesaan berdasarkan Pengembangan Ekologi*, Prosiding KABOKA-4, Samarinda, INDONESIA.
- World Bank (2000) *Entering the 21 Century, World Development Report*, Oxford University Press, New York, USA.
- Pitts Adrian, (2004) *Planning and Design Strategies for Sustainability and Profit*, Architectural Press, Elsevier, USA.
- Benson dan Roe (2000) *Landscape and sustainability*, Tailor and Francis, New York, USA.
- Smith Ishmael, (2006) *Chu'tnamit: An Edu-Eco Heritage Development in Seven Steps*, North Carolina State University, USA.
- Report, (2008) *Eco-tourism Grantmarkers Asosiation*, New York, USA
- www.rainforest-alliance.org/tourism.cfm.